

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.¹

Fintech (*financial technology*) merupakan pembaruan dalam bidang industri jasa keuangan dengan berdasarkan teknologi dan informasi yang telah memiliki payung hukum atau landasan hukum dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah Indonesia. Peran fintech di Indonesia di antaranya sebagai berikut:²

1. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2

² Muliaman D. Hadad, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia," *Kuliah Umum tentang Fintech –IBS*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2 Juni 2017

2. Meningkatkan inklusi keuangan nasional
3. Mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau
4. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar
5. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk

Teknologi Finansial menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, kemananan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan

fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.³

Fintech bukan berasal dari perbankan sebagai lembaga perluasan namun merupakan layanan yang hadir oleh perusahaan yang didirikan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu dengan menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berdasarkan sistem teknologi informasi (elektronik) dengan tujuan untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjam uang online di tengah masyarakat. Namun walaupun fintech bukan bagian dari lembaga keuangan seperti perbankan namun perkembangan dan pelaksanaan fintech tetap mendapat pengawasan dan pengaturan dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan agar konsumen atau masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pinjam uang online di tengah kemudahan yang disediakan fintech tetap mendapatkan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, pendirian fintech dalam peraturan perundang-undangan diatur dengan wajib melakukan pendaftaran perusahaan terlebih dahulu melalui Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Hingga bulan Maret 2018, terdapat sebanyak 40 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis *fintech* yang telah resmi terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga masyarakat tetap harus hati-hati sebelum memanfaatkan kemudahan yang

³ *Ibid.*, hlm. 2

disediakan oleh *fintech*, terutama harus melakukan cek terhadap perusahaan tersebut apakah sudah resmi terdaftar dalam OJK atau belum.⁴

Data Statistik tahun 2017 melaporkan bahwa nilai transaksi *fintech* di Indonesia telah mencapai USD 15 miliar. Salah satu *fintech* yang sudah dinikmati oleh masyarakat yakni perusahaan *starup* berupa ojek online yang pembayarannya berupa *go-pay* maupun *grab-pay*. Jasa pembayaran yang dikenal dengan *paytren*, *ovo*, dll. Dilihat dari perkembangan data bahwa semakin banyak *fintech* yang hadir di Indonesia dan dapat dinikmati langsung oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan berbagai kemudahan-kemudahan penggunaannya, masyarakat tanpa menyadari telah menggunakan *fintech* dalam transaksi keuangannya.⁵

Layanan keuangan digital atau financial technology (*fintech*) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas

⁴ Tri Inda F., "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technnology* (*Fintech*), *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No.1, (2018), hlm. 646

⁵ *Ibid.*, hlm. 646

sistem keuangan.⁶ Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan mengenai definisi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Peer to peer lending atau perusahaan layanan platform pinjaman langsung tunai, merupakan salah satu bisnis financial technology (fintech) yang paling pesat pertumbuhannya. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah pinjaman yang disalurkan per Januari 2018 sudah mencapai Rp 3 triliun, atau naik 17,11 persen (year to date). Sementara jumlah pelakunya mencapai 120 fintech. Rinciannya 36 fintech terdaftar, 42 masih dalam proses mendaftar, dan 42 lainnya berminat untuk mendaftar. Sementara agregat jumlah lender (pemberi pinjaman) per Januari 2018 mencapai 115.897 orang naik 14,82 persen. Dan jumlah peminjam (borrower) mencapai 330.154 orang atau meningkat 27,16 persen. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan dana tunai menjadi salah satu faktor P2P lending terus meningkat. Namun kemudahan tersebut ternyata disertai risiko yang mengancam baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Dengan proses yang terbilang cepat dan mudah masyarakat memang bisa mendapatkan uang tunai dari P2P lending. Meski dengan suku bunga yang

⁶detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com> , diunduh Kamis, 8 Maret 2018 pukul 10:10

lumayan mahal. Dengan rata-rata bunga pinjaman di atas 19 persen, fintech lending ini seolah-olah rentenir yang beroperasi menggunakan platform internet alias digital rentenir. Dengan suku bunga tinggi maka kemungkinan gagal bayar (default) dari peminjam juga tinggi.

Dalam hukum muamalah, meminjam uang di rentenir hukumnya riba. Riba merupakan perbuatan yang dibenci dan diharamkan Allah swt. Dalam QS Al-Baqarah (2): 275, Allah swt berfirman, "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Bahkan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW mengategorikan riba sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari (HR Muslim). Dalam Islam, pengharaman riba ini tidak dilakukan dalam satu kali tahap, melainkan dilakukan secara gradual (bertahap). Ini karena praktik riba (yang merupakan tradisi kaum Yahudi) sudah mengakar di kalangan masyarakat Arab saat itu, sama seperti kebiasaan meminum khamar.

Riba secara literal berarti bertambah, berkembang atau tumbuh. Akan tetapi, tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam. Dalam syariah, riba secara teknis mengacu pada pembayaran "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo.⁷ Dalam pembuatan akad yang mengandung riba secara umum, bunga dibuat pada saat permulaan akad dengan asumsi harus selalu mendapat keuntungan dan besarnya persentase keuntungan ditentukan secara sepihak

⁷ Umer Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 22

berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan dikali dengan tingkat suku bunga yang berlaku.⁸

Selain persoalan ketidakjelasan halal haramnya transaksi fintech yang dijalankan selama ini, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting yakni mengenai penyalahgunaan data pribadi para pengguna fintech, dimana banyak bermunculan kasus-kasus pinjaman online ilegal yang disertai dengan ancaman yang tidak patut dari para agen fintech yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap platform-platform fintech semakin menurun. Banyak dampak dan resiko buruk yang dirasakan masyarakat akibat penggunaan platform fintech ilegal ini. Di antaranya bahwa pinjaman hanya diberikan sebesar 60% dari total pinjaman yang diajukan dengan pemberian bunga yang sangat tinggi dan denda yang tidak terbatas. Jika peminjam dana tidak melaksanakan kewajibannya, atau telat dalam membayar, maka akan mendapatkan intimidasi yang terus-menerus dan ancaman dari agen fintech yang bertugas melakukan penagihan.

Lebih dari itu, demi mendapatkan uang mereka kembali dalam jumlah yang lebih banyak, data pengguna fintech beresiko untuk disalahgunakan, dimana pihak agen fintech dapat menggunakan semua data yang ada di hp pengguna fintech setelah kita menyetujui persyaratan online yang diarahkan oleh pihak fintech. Seperti korban fintech di Solo, dimana data di ponsel korban diakses secara bebas kemudian disebar dan diedit dengan tambahan tulisan yang memalukan untuk melunasi hutang. Untuk menarik

⁸ Burhanuddin, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 43

banyak peminjam, banyak fintech memberi label ojk atau telah terdaftar di ojk di platform mereka. Sehingga masyarakat harus berhati-hati dengan modus-modus fintech ini agar tidak dirugikan. Peran dan fungsi pengawasan OJK mutlak dibutuhkan dalam rangka mencegah dampak negatif yang diakibatkan fintech ilegal maupun fintech legal dengan teknik penagihan yang tidak wajar merebak dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *financial technology* kepada peminjam baik masyarakat maupun pelaku usaha ditinjau dari hukum dan permasalahannya yang timbul terkait sejauh mana peran dan pengawasan OJK terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna fintech. Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul, **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH *FINANCIAL TECHNOLOGY* DITINJAU DARI HUKUM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat ditarik permasalahan untuk dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada masyarakat?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat pengguna *fintech*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat ditarik tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dampak pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada masyarakat dan pelaku usaha
2. Untuk mendeskripsikan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat pengguna *fintech*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan ini, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai aturan hukum tentang pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada masyarakat
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pemikiran hukum atas konsep *financial technology* ditinjau dari hukum dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat pengguna *fintech*

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa judul penelitian skripsi atau tesis terdahulu sebagai pembanding yang pembahasannya berkaitan pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi oleh perusahaan *financial technology* di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia (Universitas Muhammadiyah Surabaya) dengan judul penelitian: **“Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”**. Dalam penelitian yang dipublikasi dalam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah dibahas mengenai peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Fintech secara global menunjukkan secara pesat Fintech berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Kendala implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia adalah dalam bidang infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), perundang-undangan, dan kurangnya literasi keuangan.⁹

⁹ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, “Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3., No.1, (2018), hlm. 22

2. Dairdo Luckandi (Universitas Islam Indonesia, 2018) dengan judul penelitian: **“Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan *Fintech* Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan *Adaptive Structuration Theory*.”** Dalam penelitian skripsi ini dibahas mengenai *Fintech* yang menjadi sebuah layanan keuangan yang dapat membantu pelaku untuk melakukan transaksi pembayaran, dengan berbagai keuntungan yang dijanjikan. Pada kenyataannya, banyak faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaku UMKM untuk menggunakan teknologi ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu berupa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *fintech* pada UMKM, dan pola penerapannya. Faktor-faktor diperoleh dari penggunaan AST, sedangkan pola penerapan diperoleh dengan cara observasi pada saat melakukan wawancara kepada narasumber. Faktor-faktor dan pola ditemukan agar dapat digunakan oleh pelaku UMKM lain dan pengguna *fintech* yang lain seperti pemerintah, penyelenggara, serta aktor lain yang terlibat dalam teknologi ini. Faktor-faktor yang diperoleh dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan *fintech* adalah berupa kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi, kemudahan, serta bisnis. Hal-hal yang berkaitan

dengan faktor-faktor pendukung ini secara nyata adalah berupa kemudahan pencatatan, kemudahan proses transaksi, serta peningkatan penjualan. Faktor penghambat pada penggunaan layanan ini adalah implementasi teknologi, biaya, serta kesiapan infrastruktur. Hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat ini secara nyata adalah berupa kebutuhan penyesuaian pada beberapa titik saat mengimplementasikan teknologi ini. Pola penerapan *fintech* pada pelaku UMKM meliputi beberapa fase. Secara garis besar, *fintech* muncul disaat pelaku UMKM memerlukan tambahan pasar. Informasi tentang penggunaan *fintech* didapatkan oleh pelaku UMKM dari penyedia layanan dan dari rekan sesama pelaku usaha. Dengan informasi tersebut, pelaku UMKM mencoba menerapkan layanan *fintech*. Masalah yang biasa timbul, seperti sudah disebutkan pada faktor-faktor penghambat di atas, secara garis besar adalah penyesuaian biaya. Dengan masalah tersebut, pelaku UMKM melakukan penyesuaian harga, untuk selanjutnya tetap mempertahankan layanan yang menguntungkan dari penggunaan *fintech*.¹⁰

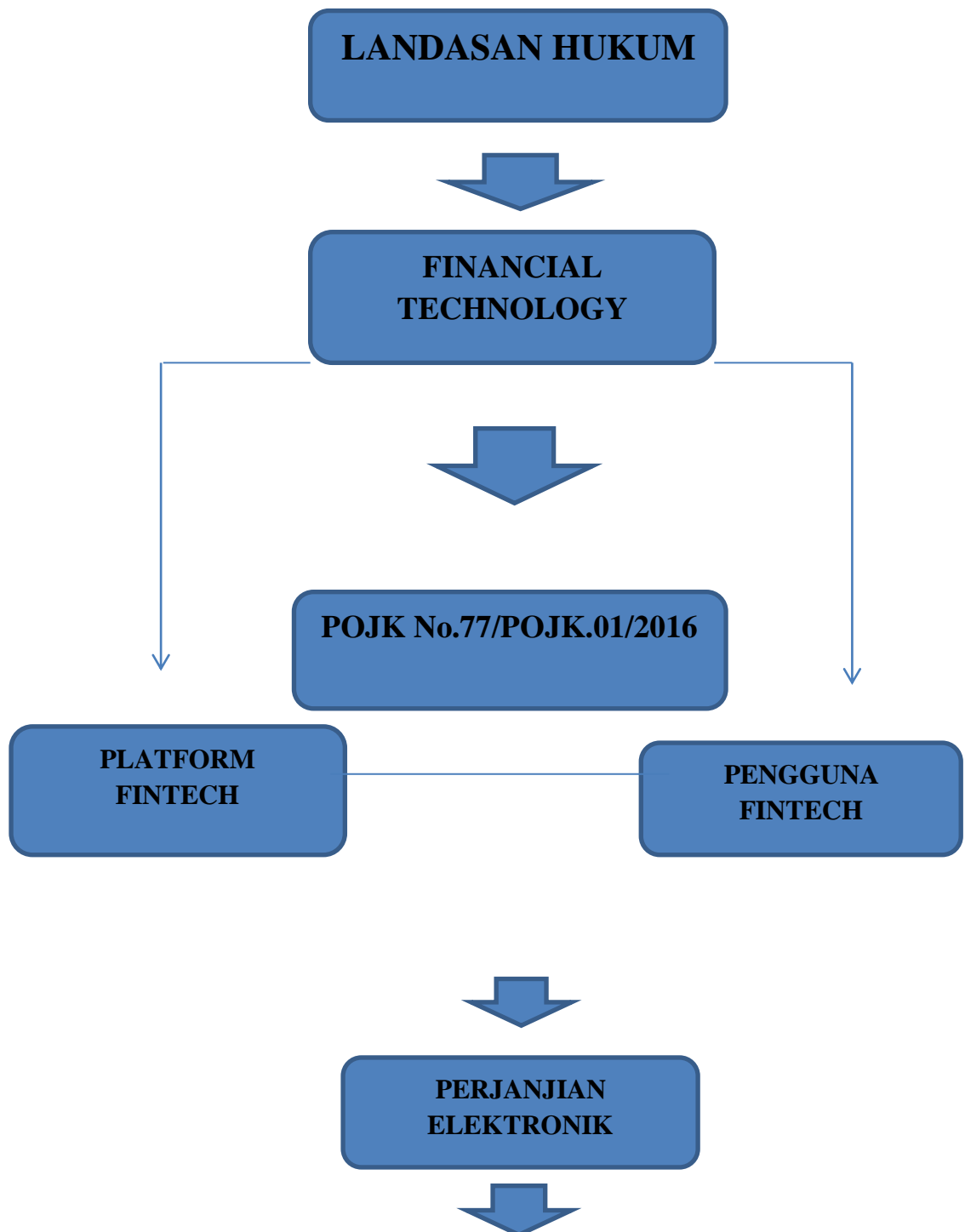
3. Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono (Universitas Diponegoro, 2017) dengan judul penelitian: **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology***

¹⁰ Diardo Luckandi, “Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan *Fintech* Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan *Adaptive Structuration Theory*,” Skripsi, Program Magister Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia, (2018), hlm.56

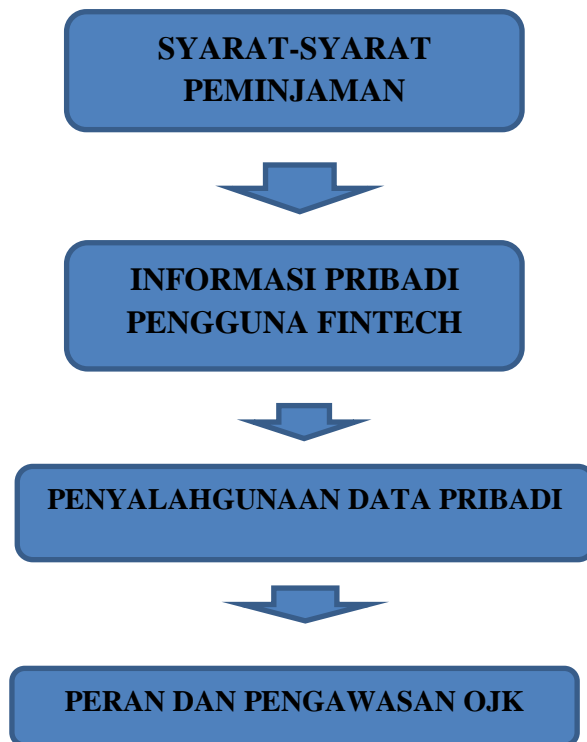
(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016).” Dalam penelitian ini dibahas mengenai hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam fintech dan mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap fintech berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga macam hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan fintech berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016. Kemudian mekanisme pengawasan OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu, tahap pra-operasional usaha dan tahap operasional usaha. Pelaksanaan pengawasan OJK terhadap fintech saat ini belum dapat berjalan optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada tahap pra-operasional

usaha dikarenakan adanya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.¹¹

F. Kerangka Pemikiran



¹¹ Ernema Santi, Budiharto, Hendro Saptono, *Op. Cit.*, hlm. 1



G. Kerangka Teoritik

Financial Technology merupakan inovasi di bidang teknologi yang mengarah khususnya pada inovasi di bidang finansial dengan berbasis pada teknologi modern di bidang jasa. Pertumbuhan *fintech* di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut berfokus di sektor bisnis di perbankan sebagai solusi dan juga potensi yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam industri keuangan. Di di Indonesia, potensi di sektor keuangan telah menembus 35,8% dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh *fintech* dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Dengan berlandaskan pada teknologi di bidang sektor keuangan, layanan *fintech* menjadi lebih

efektif dan efisien. Fintech didirikan dengan sistem perusahaan yang memanfaatkan teknologi inovatif modern yang membentuk penyediaan jasa keuangan. Fintech dipandang sebagai solusi yang hadir di masyarakat sebagai pasar baru yang mengintegrasikan antara keuangan dan teknologi dengan berbagai pro kontra yang hadir dalam implementasinya di Indonesia. Perusahaan FinTech merupakan perusahaan yang menawarkan teknologi untuk perbankan, keuangan perusahaan, pasar modal, analisis data keuangan, pembayaran, dan manajemen keuangan pribadi, termasuk dalam manajemen resiko yang secara mandiri diatur dalam perusahaan Fintech.

Di Indonesia saat ini model bisnis e-commerce telah berkembang, tidak hanya di sektor ritel atau pasar untuk produk, tetapi juga berkembang pada layanan transportasi, seperti Go-Jek, Grab, layanan keuangan seperti modalku, dan Uang Teman. Layanan keuangan ini merupakan bagian FinTech.¹² Menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menimbang bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology* (*FinTech*) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. FinTech akan menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis,

¹² Iska Sri Mawarni, “Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada *Financial Technology* (Studi Kasus Terhadap Layanan Go-Pay “Gojek” di Kota Bandung 2017)”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Telkom, Bandung, (2017), hlm. 1-2

aman serta modern. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (peer-to-peer lending). Peraturan tersebut mencakup persoalan bentuk badan hukum LPMUBTI, permodalan LPMUBTI, kegiatan usaha, pendaftaran ke OJK, permohonan ijin operasional, kualifikasi sumber daya manusia, persyaratan pengguna jasa LPMUBTI, mitigasi risiko, pusat data dan pemulihan bencana, kerahasiaan data pengguna, rekam jejak audit, laporan berkala.¹³

Dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai landasan hukum pelaksanaan fintech di Indonesia sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, secara yuridis dijelaskan dalam Pasal 2 tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan. Bahwa penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya dimana bentuk badan hukum penyelenggara dapat berbentuk perseroan terbatas dan koperasi, yang dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI/ badan hukum Indonesia dan atau WNA / badan hukum asing sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3, dengan kepemilikan saham paling banyak 85% dengan jumlah modal disetor paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.

¹³ Siti L., Andi T., Dheasey A., "Management of Fintech Based on Loans in Indonesia From Critical Management Studies Perspective," *Makalah Lepas*, hlm. 5

Mengenai sistem dalam pemberian kredit atau pinjam meminjam dengan uang secara elektronik, dijelaskan kemudian dalam Pasal 5 bahwa penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman, dimana dalam hal ini penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Disebut sebagai penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian *non-doktrinal* sebab merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat dengan mencari data primer yang ada di lapangan.¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian empiris sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji data primer di lapangan atau di masyarakat sehingga diperoleh fakta dan gambaran yang jelas terhadap suatu permasalahan terkait.¹⁵ Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti. Sehingga penelitian ini

¹⁴ Salim dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

dilakukan dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan mengkaji dampak pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat pengguna *fintech*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif¹⁶. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas terkait dengan analisis pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh *financial technology* ditinjau dari hukum dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat pengguna *fintech*.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan para pengguna fintech dan korban fintech illegal di wilayah Surakarta serta pihak OJK Surakarta. Pengambilan lokasi ini memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh *financial technology* ditinjau dari hukum dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa

¹⁶Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10

Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat pengguna *fintech*.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Data diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dan bersumber dari para korban *fintech* ilegal dan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan wawancara yakni mengajukan pertanyaan kepada informan secara tatap muka, maka dari wawancara tersebut akan diperoleh hasil dari tanya jawab oleh informan yang nantinya akan menjadi data dalam penelitian.¹⁷ Informasi yang akan digali adalah mengenai analisis pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh *financial technology*.

b. Data Sekunder

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, aturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Bahan hukum ini berfungsi memberikan informasi yang mendukung penelitian ini, data sekunder ini bersumber pada regulasi peraturan perundang-

¹⁷ Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 139

undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁸

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (peer-to-peer lending). Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua dokumen hukum yang tidak bersifat mengikat yang bukan merupakan dokumen resmi yang fungsinya memberikan penjelasan atau penunjang terhadap bahan hukum primer yakni antara lain jurnal penelitian, makalah, buku, tulisan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh *financial technology*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden atau sumber informasi.¹⁹ Data atau informasi itu berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran atau pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu hal yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini wawancara mendalam akan dilakukan kepada para pengguna fintech illegal dan pihak OJK.

6. Metode Analisis Data

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 154

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.²⁰ Proses analisis data yang diperoleh dari teknik wawancara guna mencari data primer di lapangan dan juga teknik dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan analisis pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh *financial technology*.

I. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, roadmap penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang kajian teori, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan, kajian teori tentang financial technology, perkembangan

²⁰Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

financial technology di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan fintech dan kajian teori tentang pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, dan prinsip-prinsip pembiayaan.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai dampak pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada masyarakat dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat pengguna *fintech*.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA